PENGARUH KUALITAS SISTEM INFORMASI TERHADAP KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANDUNG

THE INFLUENCE OF THE QUALITY OF INFORMATION SYSTEM TO THE QUALITY OF TAX AUDIT AND THE IMPLICATIONS FOR TAX COMPLIANCE ON KPP MADYA BANDUNG

Disusun Oleh :
Derry Dessyany 2.11.10.131
(e-mail: derrydessyany@gmail.com)
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

Dibimbing Oleh Dr. Siti Kurnia Rahayu., S.E., M.Ak., Ak., CA.

ABSTRACT

Tax compliance is still very low. Taxpayers in the calculation of the tax is not correct, compliance in paying taxes are still low, the taxpayer in the SPT not timely. The number of taxpayer complaints regarding tax audit quality is still disappointing of all the complaints largely claim that the tax audit quality is still low. Information systems and the quality is not yet up to date.

The purpose of this study was to analyze the effect on the quality of information systems quality tax audits and tax compliance in the KPP Madya Bandung.

The method used in this research is descriptive method and verification method by method analysis of Structural Equation Model (SEM) PLS using SPSS 20.0 software and software SmartPLS 2.0.

These results indicate that the quality of the information systems on the quality of tax audits weak effect, and the quality of tax audits on tax compliance effect is weak. This study provides empirical evidence that the quality of the information system affects the quality of tax audits and tax compliance implications for the KPP Madya Bandung.

Key words : Quality of information systems, Quality of tax audits, Tax compliance.

I. PENDAHULUAN

Masalah kepatuhan perpajakan merupakan masalah yang penting untuk masyarakat dan negara diseluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang (Siti Kurnia Rahayu, 2010 : 140). Wajib pajak yang sudah dapat dikatakan patuh adalah wajib pajak yang mentaati dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Siti Kurnia Rahayu, 2010 : 138). Namun membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional, pada dasarnya tidak seorangpun yang menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan belanja (Siti Kurnia Rahayu, 2010 : 142). Seperti kondisi yang terjadi di lapangan saat ini, menunjukan bahwa Kepatuhan perpajakan masih sangat rendah (Agus Martowardojo, 2012, Yuli Kristoyo, 2013 dan Fuad Rahmany, 2014). Wajib pajak dalam menyampaikan SPT belum tepat waktu (Syafri Adnan Baharuddin, 2011 dan Agus Martowardojo, 2012). Wajib pajak dalam melakukan perhitungan jumlah pajak terutang belum benar, kepatuhan perpajakan badan usaha masih rendah (Agus Martowardojo, 2012). Kepatuhan dalam membayar pajak masih rendah (Fuad Rahmany, 2014).

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan/ atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajaka (Soemarso, 2007 : 60). Pemeriksaan pajak untuk pengujian kepatuhan wajib pajak diawali dengan pemeriksaan atas SPT dan lampiran-lampiran pendukungnya termasuk laporan keuangan (John Hutagaol, 2007 : 71). Dengan

pemeriksaan pajak diharapkan kepatuhan di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Pada kenyataannya kondisi di lapangan menunjukan bahwa banyaknya pengaduan wajib pajak mengenai kualitas pemeriksaan pajak yang masih mengecewakan (Anwar supriyadi, 2010). Dari seluruh pengaduan tersebut sebagian besar menyatakan bahwa kualitas pemeriksaan pajak masih rendah (Anwar supriyadi dan Agus Martowardojo, 2010).

Berhubung telah semakin luasnya penggunaan sistem informasi untuk membantu penyelenggaraan pembukuan wajib pajak dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pemeriksaan pajak (John Hutagaol, 2007 : 71). Yang bertujuan agar pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif maka perlu penggunaan sistem informasi secara luas dalam pemeriksaan dan secara selektif memilih wajib pajak yang akan di periksa (John Hutagaol, 2007 : 73). Dalam satu dekade terakhir ini, kemajuan teknologi informasi sangat pesat dan bahkan telah menyentuh hampir seluruh kehidupan manusia, Pengembangan teknologi informasi seperti internet, faximili dan telekomunikasi sangat mempengaruhi pola dan perilaku berbisnis karena dengan teknologi informasi, komunikasi bisnis dapat dilakukan via internet secara global (John Hutagaol, 2007 : 91). Pada kenyataannya kondisi di lapangan menunjukan bahwa dalam Sistem informasi belum berkualitas dan belum *up to date* (Agus Martowardojo, 2010). Belum adanya integrasi informasi yang komprehensif secara elektronik (Susiwijono, 2011).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Implikasinya Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung".**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah (1) Seberapa besar pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kualitas pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. (2) Seberapa besar pengaruh kualitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

Maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan kebenaran bahwa Kualitas Sistem Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak dan berimplikasi terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan mengumpulkan data yang akurat dan relevan melalui uji empiris. Dengan tujuan penelitian (1) Untuk menganalisis pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kualitas pemeriksaan pajak. (2) Untuk menganalisis pengaruh kualitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan perpajakan.

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memecahkan masalah yang terjadi mengenai kepatuhan perpajakan. Dimana masih banyak wajib pajak yang belum patuh dan hal tersebut dibuktikan oleh pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak. Dalam melakukan pemeriksaan jika menggunakan sistem informasi yang baik maka potensi untuk melihat kepatuhan perpajakan akan lebih baik. Serta hasil penelitian ini sebagai pengembangan ilmu melalui pembuktian empiris dari konsep yang sudah dikaji. Diharapkan dapat menunjukan bahwa kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh kualitas pemeriksaan pajak dan kualitas pemeriksaan pajak dipengaruhi oleh kualitas sistem informasi, serta untuk pengembangan ilmu terkait dengan perihal terkait diatas.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Menurut DeLone dan McLean (2003) Kualitas sistem informasi adalah Kualitas sistem berarti fokus pada performas sistem informasi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan dan prosedur yang dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang terdiri dari kemudahan untuk digunakan (*ease to use*), kemudahan diakses (*flexibility*), keandalan sistem (*reliability*). Sedangkan menurut Witarto (2004 : 19) kualitas sistem informasi adalah Sistem informasi dapat dikatakan berkualitas jika usernya rajin memasukkan dan

memeriksa data dari waktu ke waktu, jika operatornya rajin memeriksa kebenaran proses-proses pengolahan data yang ada di dalamnya, melalui keberadaan sistem informasi yang *up to date*, serta didasarkan pada data yang akurat dan mutakhir.

Menurut John Hutagaol (2007 : 91) Kualitas Pemeriksaan Pajak adalah Pemeriksaan pajak akan jadi berkualitas serta dapat memberikan kepastian dan kepuasan bagi wajib pajak jika pemeriksaan pajak tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Senada dengan John Hutagaol menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 264) Kualitas Pemeriksaan Pajak adalah Pemeriksaan pajak akan dapat menjadi berkualitas bila didukung dengan tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu, dan mengikuti standar/ pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan perpajakan.

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) Kepatuhan Perpajakan adalah Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010: 139) kepatuhan perpajakan adalah Kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi dari kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu dan kepatuhan dalam membayar pajak terhutang.

Menurut John Hutagaol yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010 : 260) yang menyatakan bahwa Kualitas Sistem Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, adalah Kemajuan sistem informasi yang telah dimanfaatkan oleh wajib pajak harus di iringi dengan penggunaan sistem informasi oleh pemeriksa. Ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak. Masih menurut John Hutagaol (2007 : 91) yang menyatakan bahwa Kualitas Sistem Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, adalah Perkembangan komputer *hardware* dan *software* dalam sistem informasi sangat membantu pelaksanaan pemeriksaan pajak sehingga pemeriksaan dapat diselesaikan secara efisien dan efektif serta hasilnya berkualitas.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 245) yang menyatakan bahwa Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan, adalah Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukanya pemeriksaan terhadap dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Menurut John Hutagaol (2007 : 91) yang menyatakan bahwa Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan, adalah Pemeriksaan pajak menggunakan sistem informasi dapat memberikan *deterrent effect* dan sekaligus mempengaruhi peningkatkan kepatuhan perpajakan.

Hipotesis yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

H_1 : Kualitas Sistem Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.
H_2 : Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah kualitas sistem informasi, kualitas pemeriksaan pajak dan kepatuhan perpajakan. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. Desain penelitian terdapat pada Tabel 3.1 Desain Penelitian sedangkan Operasionalisasi Variabel terdapat pada tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, karena peneliti mengumpulkan sendiri data-data yang dibutuhkan yang bersumber langsung dari objek pertama

yang akan diteliti. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban responden atas kuesioner untuk variabel kualitas sistem informasi, kualitas pemeriksaan pajak dan kepatuhan perpajakan.

Responden dalam penelitian ini adalah 122 orang Fiskus Pada Kantor Pelayana Pajak Madya Bandung, namun karena penarikan sampel menggunakan *Purposive Sampling* maka peneliti membatasi sampel dengan kriteria pegawai yang menggunakan sistem informasi dalam pekerjaannya, pegawai yang melakukan pemeriksaan pajak dan pegawai yang berhubungan langsung dengan wajib pajak dimana dapat menilai kepatuhan perpajakan. Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 75 responden yang terbagi atas *Account Representative* pada seksi pengawasan dan konsultasi sebanyak 31 responden serta Kelompok fungsional pemeriksa pajak sebanyak 44 responden.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 75 responden serta melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis verifikatif, penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana kualitas sistem informasi yang mempengaruhi kualitas pemeriksaan pajak dan kualitas pemeriksaan pajak yang mempengaruhi kepatuhan pajak sedangkan analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS 2.0*. Penulis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan alasan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya (*variable manifest*), serta secara bersama-sama melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran (*error*). Sehingga penulis dapat menganalisis secara lebih terperinci indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya.

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

1) Hipotesis 1

Hipotesis pertama adalah Kualitas Sistem Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

Tolak H_o jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan. Dimana t_{tabel} untuk $\alpha = 0,05$ sebesar 1,96.

2) Hipotesis 2

Hipotesis kedua adalah Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

Tolak H_o jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan. Dimana t_{tabel} untuk $\alpha = 0,05$ sebesar 1,96.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil data (jawaban) kuesioner yang disebarkan kepada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini yang diolah ke dalam statistika. Populasi sasaran sebanyak 75 responden yaitu Pegawai Seksi Pengawasan dan Konsultasi yakni *Account representative* 31 responden dan Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak 44 responden pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. Dari 75 buah angket penelitian yang disebarkan kepada 75 responden, diterima kembali sebanyak 66 buah angket penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey menggunakan kuesioner. Kuesioner dikirimkan oleh peneliti dengan cara dititipkan kepada Sub Bagian Umum di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. Pengembalian dengan cara diambil kembali oleh peneliti.

Tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) adalah sebesar 88%, yang didapatkan dan dihitung dari persentase jumlah kuesioner yang kembali (66 kuesioner) dibagi jumlah kuesioner yang dikirim (75 kuesioner). Tingkat pengembalian kuisioner (*response rate*) sebesar

88% dan termasuk kriteria *excellent* (sangat baik), artinya tingkat pengembalian kuisioner (*response rate*) dapat diterima dan hasil jawaban kuisioner dapat diolah, karena *response rate* lebih besar dari krieria *acceptable* (dapat diterima) yaitu sebasar 60-69% (Yang dan Miller, 2008 : 231).

Hasil Uji Validitas

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan teknik korelasi *spearman* (indeks validitas), maka diperoleh hasil uji validitas dalam tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Sistem Informasi, 4.2 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak, dan 4.3 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Perpajakan.

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi (indeks validitas) dari setiap butir pernyataan di setiap variable laten lebih besar dari nilai kritis 0.30. Hasil uji validitas ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel Kualitas Sistem Informasi, Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Perpajakan adalah valid dan tepat/ mampu mengukur tiap indikator, sehingga mampu mencapai tujuan pengukuran menghasilkan data untuk setiap variabel laten dalam penelitian ini. Selain itu, menunjukkan ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui kuesioner. Jadi, berdasarkan hasil uji validitas, kuesioner telah tepat untuk dijadikan alat mengumpulkan data mengenai variabel Kualitas Sistem Informasi, Kualitas Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Perpajakan.

Hasil Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode *split half*, maka diperoleh hasil uji reliabilitas pada tabel 4.4 Hasil Perhitungan Koefisien Reliabilitas.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai koefisien reliabilitas dari setiap variabel laten lebih besar dari nilai kritis (0,70) sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebagai acuan studi ini, dapat dipercaya (reliable) dan andal. Dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data secara berulang-ulang dalam waktu berbeda dan responden yang berbeda. Sehingga dapat dikatakan bahwa kuesioner ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data kepada 66 responden dengan waktu yang berbeda (1 minggu).

Hasil Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Sistem Informasi (X)

Variabel Kualitas Sistem Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Kualitas Sistem Informasi diukur dengan 4 Indikator yaitu *Reliability* (Keandalan), *Adaptability* (Keadaptasian), Integrasi yang harmonis dan *Ease of use* (Kemudahan penggunaan) dapat dibagikan serta dioperasionalisasikan menjadi 6 butir pernyataan.

Untuk menilai masing-masing indikator penulis menggunakan nilai persentase skor ideal dengan skor total. Dari data penelitian diperoleh penilaian responden untuk empat indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Kualitas sistem informasi dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel 4.5 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Kualitas Sistem Informasi.

Pada tabel 4.5 dapat dilihat skor tanggapan responden untuk keempat indikator dari Kualitas Sistem Informasi diperoleh sebesar 1386 (71.25%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kualitas Sistem Informasi di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung berada dalam kategori cukup baik, artinya penelitian dilapangan menunjukan bahwa sistem informasi yang digunakan di KPP Madya Bandung cukup berkualitas, namun masih terdapat gap sebesar 28.75%.

Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y)

Variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Kualitas Pemeriksaan Pajak diukur menggunakan 3 indikator yaitu Tahapan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai prosedurnya, Jangka waktu pemeriksaan pajak yang tepat waktu, dan

Mengikuti standar/ pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan perpajakan, dapat dibagikan serta dioperasionalisasikan menjadi 5 butir pernyataan.

Untuk menilai masing-masing indikator penulis menggunakan nilai persentase skor ideal dengan skor total. Dari data penelitian diperoleh penilaian responden untuk tiga indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Kualitas pemeriksaan pajak dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel 4.6 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Kualitas Pemeriksaan Pajak.

Pada tabel 4.6 dapat dilihat skor tanggapan responden untuk ketiga indikator dari Kualitas Pemeriksaan Pajak diperoleh sebesar 1375 (83.94%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung berada dalam kategori baik, artinya penelitian dilapangan menunjukan bahwa pemeriksaan pajak di KPP Madya Bandung sudah berkualitas namun masih terdapat gap sebesar 16.06%.

Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Perpajakan (Z)

Variabel Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Kepatuhan Perpajakan diukur dengan 4 indikator yaitu Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, Melakukan perhitungan dengan benar, Malakukan pembayaran tepat waktu dan Wajib pajak menyampaikan SPT sebelum batas waktu berakhir, dapat dibagikan serta dioperasionalisasikan menjadi 4 butir pernyataan.

Untuk menilai masing-masing indikator penulis menggunakan nilai persentase skor ideal dengan skor total. Dari data penelitian diperoleh penilaian responden untuk empat indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Kepatuhan Perpajakan dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel 4.7 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Kepatuhan Perpajakan.

Pada tabel 4.7 dapat dilihat skor tanggapan responden untuk ketiga indikator dari Kepatuhan Perpajakan diperoleh sebesar 817 (61.89%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung berada dalam kategori cukup baik, artinya penelitian dilapangan menunjukan bahwa kepatuhan perpajakan di KPP Madya Bandung sudah cukup baik namun masih terdapat gap sebesar 36.21%.

Hasil Analisis Verifikatif

Analisisi Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Implikasinya Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Model pengukuran merupakan model yang menghubungkan antara variabel laten dengan variabel manifes. Pada penelitian ini terdapat 3 variabel laten dengan jumlah variabel manifes sebanyak 11. Variabel laten kualitas system informasi terdiri dari 4 variabel manifes, variabel laten kualitas pemeriksaan pajak terdiri dari 3 variabel manifes dan variabel laten kepatuhan perpajakan terdiri dari 4 variabel manifes. Hasil perhitungan dari keseluruhan model menggunakan *SmartPLS 2.0* terdapat pada Gambar 4.1 Hasil Perhitungan Variabel Penelitian Secara Keseluruhan.

Pengujian Kecocokan Model Pengukuran (*Outer Model)*

Variabel Kualitas Sistem Informasi

Kualitas Sistem Informasi terdiri dari 4 variabel *manifes* dan bobot faktor masing-masing variabel *manifest* dalam merefleksikan variabel kualitas sistem informasi terdapat pada tabel 4.8 Bobot Faktor Variabel Kualitas Sistem Informasi.

Berdasarkan tabel 4.8, hasil bobot faktor (*loading factor*) untuk keempat variabel manifest yang diperoleh menunjukkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur Kualitas Sistem Informasi valid dan reliabel dalam merefleksikan variabel Kualitas Sistem Informasi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai loading untuk masing-masing variabel manifes lebih besar dari 0.5 dan juga dari hasil pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai kritis 1.96. Artinya indikator yang digunakan tersebut secara signifikan mampu merefleksikan variabel kualitas sistem informasi.

Nilai *composite reliability* (CR) untuk variabel laten Kualitas Sistem Informasi sebesar 0.927. Nilai CR ini menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk laten variabel Kualitas Sistem Informasi sebesar 0.927 dan lebih besar dari yang direkomendasikan

yaitu 0.70. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) sebesar 0.759 telah memenuhi kriteria *Driscriminant Validity* (lebih besar dari 0.5) menunjukkan bahwa 75.9% informasi yang terdapat pada variabel Kualitas Sistem Informasi dapat tercermin melaluinya.

Variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak

Kualitas Pemeriksaan Pajak terdiri dari 3 variabel manifest dan bobot faktor masing-masing variabel manifes dalam merefleksikan variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak terdapat pada tabel 4.9 Bobot Faktor Variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak.

Seperti yang tersaji pada tabel 4.9 hasil bobot faktor (*loading factor*) untuk ketiga variabel manifest yang diperoleh menunjukkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur Kualitas Pemeriksaan Pajak sudah valid dan reliable dalam merefleksikan variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai loading untuk masing-masing variabel manifes lebih besar dari 0.5 dan juga dari hasil pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai kritis 1.96. Artinya indikator yang digunakan tersebut secara signifikan mampu merefleksikan variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak.

Nilai *Composite Reliability* (CR) untuk variabel laten Kualitas Pemeriksaan Pajak 0.909. Nilai CR ini menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk laten variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak sebesar 0.909 dan lebih besar dari yang direkomendasikan yaitu 0.70. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) sebesar 0.768 telah memenuhi kriteria *Driscriminant Validity* (lebih besar dari 0.5) yang menunjukkan bahwa 76.8% informasi yang terdapat pada variabel kualitas pemeriksaan pajak dapat tercermin melalui indikatornya.

Variabel Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan Perpajakan terdiri dari 4 variabel *manifes* dan bobot faktor masing-masing variabel *manifest* dalam merefleksikan variabel Kepatuhan Perpajakan terdaapat pada tabel 4.10 Bobot Faktor Variabel Kepatuhan Perpajakan.

Berdasarkan tabel 4.10, hasil bobot faktor (*loading factor*) untuk keempat variabel manifest yang diperoleh menunjukkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur Kepatuhan Perpajakan valid dan reliabel dalam merefleksikan variabel Kepatuhan Perpajakan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai loading untuk masing-masing variabel manifes lebih besar dari 0.5 dan juga dari hasil pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai kritis 1.96. Artinya indikator yang digunakan tersebut secara signifikan mampu merefleksikan variabel kepatuhan perpajakan.

Nilai *composite reliability* (CR) untuk variabel laten Kepatuhan Perpajakan sebesar 0.897. Nilai CR ini menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk laten variabel Kepatuhan Perpajakan sebesar 0.897 dan lebih besar dari yang direkomendasikan yaitu 0.70. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) sebesar 0.687 menunjukkan bahwa 68.7% informasi yang terdapat pada variabel Kepatuhan Perpajakan dapat tercermin melalui indikatornya.

Validitas Konvergen (*Convergent Validity*/ CV)

Hasil perhitungan Nilai *Convergent validity* untuk ketiga variabel laten dalam model yang diteliti terlihat pada tabel 4.11 adalah sebagai berikut:

1) Hasil korelasi konstruk Kualitas Sistem Informasi (X) dengan indikatornya *Reliability* (Keandalan), *Adaptability* (Keadaptasian), Integrasi yang Harmonis, dan *Ease Of Use* (Kemudahan Penggunaan), lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan indikator lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten Kualitas Sistem Informasi (X) tepat dibentuk oleh indikatornya.
2) Hasil perhitungan pada tabel terlihat korelasi Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y) dengan indikatornya Tahap pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya, Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu, dan Mengikuti standar/ pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan perpajakan, lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan indikator lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y) tepat dibentuk oleh indikatornya.
3) Hasil korelasi konstruk Kepatuhan Perpajakan (Z) dengan indikatornya Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, Melakukan perhitungan dengan

benar, Melakukan pembayaran tepat waktu, dan Wajib pajak menyampaikan SPT sebelum batas waktu berakhir , lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan indikator lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten Kepatuhan Perpajakan (Z) tepat dibentuk oleh indikatornya.

Validitas Diskriminan (*Discriminan Validity*/ DV)

Hasil perbandingan akar nilai AVE dengan korelasi antar konstruk/variabel laten terlihat pada tabel 4.12 Perbandingan Nilai AVE dengan Korelasi antar Variabel Laten.

Dari perbandingan nilai akar kuadrat AVE untuk masing masing variabel laten dengan korelasi antar variabel laten pada tabel 4.12 terlihat bahwa nilai akar kuadrat AVE untuk masing-masing variabel laten lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar masing-masing variabel laten. Hal ini menunjukan bahwa variabel laten yang terbentuk memiliki validitas yang baik dibentuk oleh indikatornya dibandingakan dengan variabel laten yang lainnya.

Pengujian Kecocokan Model Struktural (*Inner Model*)

Hasil uji kecocokan model struktural dalam penelitian ini terdapat pada tabel 4.13 Hasil Uji Kecocokan Model Struktural.

Nilai koefisien korelasi menunjukkan hubungan (korelasi) antar dua buah variabel. Hasil uji dari nilai koefisien korelasi dari tabel 4.13 adalah sebagai berikut:

a. Nilai koefisien korelasi Kualitas Sistem Informasi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak sebesar 0.222 dan termasuk ke dalam kriteria korelasi rendah. Artinya pelaksanaan Pemeriksaan Pajak akan berkualitas jika didukung oleh Sistem Informasi yang berkualitas.
b. Nilai koefisien korelasi Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan sebesar 0.369 dan termasuk ke dalam kriteria korelasi rendah. Artinya Kepatuhan Perpajakan akan menjadi tinggi jika didukung oleh Kualitas Pemeriksaan Pajak yang berkualitas.

Nilai koefisien determinasi (R-*square*/R^2) menunjukkan besarnya ketepatan pengaruh antar variabel laten. Hasil uji dari nilai koefisien determinasi (R^2) dari tabel 4.13 adalah sebagai berikut:

a. Nilai koefisien determinasi (R^2) Kualitas Sistem Informasi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak sebesar 0.050 dan termasuk ke dalam kriteria determinasi rendah. Artinya Kualitas Sistem Informasi cukup tepat dalam mempengaruhi Kualitas Pemeriksaan Pajak sebesar 5% dan memiliki *gap* sebesar 95% yang merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.
b. Nilai koefisien determinasi (R^2) Pelaksanaan Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan sebesar 0.136 dan termasuk ke dalam kriteria determinasi rendah. Artinya Kualitas Pemeriksaan Pajak cukup tepat dalam mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan sebesar 13.6% dan memiliki *gap* sebesar 86.4% yang merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Pengujian Kecocokan Model Gabungan (*Combination Model*)

Hasil dari uji kecocokan model gabungan terdapat pada tabel 4.14 Nilai *Goodness of Fit.* Tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa nilai GoF sebesar 0.263 dan termasuk kriteria substansial. Artinya model keseluruhan dengan ketiga variabel laten yang membentuknya memiliki validitas cukup kuat.

Hasil Pengujian Hipotesis

1. Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Hipotesis pertama yang akan diuji adalah Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak. Dari lampiran hasil pengolahan data menggunakan software *SmartPLS 2.0* diperoleh persamaan struktural yang terdapat pada tabel 4.15 Persamaan Struktural Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

Seperti yang tersaji pada Tabel 4.15 menunjukan bahwa koefisien Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak 0.221 atau 22.1% sedangkan sisanya

sebesar 77.9% merupakan pengaruh faktor-faktor lain diluar variabel eksogen yang diteliti. Artinya kualitas sistem informasi memiliki pengaruh yang lemah terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. Secara visual diagram jalur pada pengujian hipotesis pertama terdapat pada gambar 4.2 Diagram Jalur Pengujian Hipotesis I.

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut :

$H_0 : \gamma = 0$ Kualitas Sistem Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

$H_1 : \gamma \neq 0$ Kualitas Sistem Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat nilai t_{hitung} korelasi kualitas sistem informasi sebesar 2.831 lebih besar dari t_{kritis} (1.96). Karena nilai t_{hitung} lebih besar dibanding t_{kritis}, maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_1 diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa kualitas sistem informasi berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

2. Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Hipotesis selanjutnya yang akan diuji adalah Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. Dari lampiran hasil pengolahan data menggunakan software *SmartPLS 2.0* diperoleh persamaan struktural yang terdapat pada tabel 4.16 Persamaan Struktural Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan.

Seperti yang tersaji pada Tabel 4.16 menunjukan bahwa koefisien Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak 0.369 atau 36.9% sedangkan sisanya sebesar 63.1% merupakan pengaruh faktor-faktor lain diluar variabel eksogen yang diteliti. Artinya kualitas pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang lemah) terhadap kepatuhan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. Secara visual diagram jalur pada pengujian hipotesis kedua terdapat pada gambar 4.3 Diagram Jalur Pengujian Hipotesis 2.

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut :

$H_0 : \gamma = 0$ Kualitas Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan.

$H_1 : \gamma \neq 0$ Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan.

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat nilai t_{hitung} korelasi kualitas pemeriksaan pajak sebesar 6.691 lebih besar dari t_{kritis} (1.96). Karena nilai t_{hitung} lebih besar dibanding t_{kritis}, maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_1 diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

Pembahasan

Analisis Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilait$_{hitung}$ sebesar 2.831 lebih besar dari t_{kritis} (1.96) yang menunjukkan bahwa hipotesis diterima artinya Kualitas Sistem Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak. Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan menunjukan bahwa banyaknya pengaduan wajib pajak mengenai kualitas pemeriksaan pajak yang masih mengecewakan (Anwar supriyadi, 2010). Dan seluruh pengaduan tersebut sebagian besar menyatakan bahwa kualitas pemeriksaan pajak masih rendah (Anwar supriyadi dan Agus Martowardojo, 2010), berdasarkan hasil pengujian penelitian ini terjadi karena kualitas sistem informasi.

Penelitian dilapangan, diperoleh dari hasil peritungan korelasi antar variabel laten sebesar 0.221 dan nilai koefisien determinasi sebesar 5% sehingga termasuk dalam kriteria rendah dengan arah positif. Arah hubungan positif antara kualitas sistem informasi dengan kualitas pemeriksaan pajak menunjukan bahwa sistem informasi yang berkualitas akan diikuti dengan pemeriksaan pajak yang berkualitas dan kontribusi kualitas sistem informasi sebesar 5%

terhadap kualitas pemeriksaan pajak . Sisanya sebesar 95% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Besar pengauh sebanyak 95% tersebut dapat dijelaskan dari hasil analisis deskriptif yang dilakukan. Hasil analisis deskriptif membuktikan bahwa kualitas sistem informasi mempunyai skor tanggapan responden sebesar 71.25% dan termasuk kategori cukup baik yang artinya sistem informasi yang digunakan cukup berkualitas. Artinya dengan kondisi kualitas sistem informasi tidak lebih baik dari kualitas pemeriksaan pajak maka logis untuk mempengaruhi sedikit pada variabel kualitas pemeriksaan pajak.

Selain dari hasil analisis deskriptif di atas, kontribusi 5% tersebut dapat dilihat dari nilai standar deviasi (variasi data). Standar deviasi kualitas sistem informasi sebesar 0.099 dan standar deviasi kualitas pemeriksaan pajak sebesar 0.042. Nilai standar deviasi kualitas pemeriksaan pajak lebih kecil dari standar deviasi kualitas sistem informasi, artinya kualitas pemeriksaan pajak memiliki variasi data yang lebih sedikit (bagus) daripada kualitas sistem informasi yang memiliki variasi data lebih banyak (kurang bagus). Hal ini menunjukan bahwa dilihat dari nilai variasi data masing-masing variabel, kemungkinan kualitas sistem informasi mempengaruhi kualitas pemeriksaan pajak sangatlah tidak mungkin, namun pada kenyataannya kualitas sistem informasi sedikit berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak yaitu sebesar 5% (nilai koefisien determinasi).

Sehingga untuk memperbaiki masalah Kualitas Pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan Kualitas Sistem Informasi yaitu dengan meningkatkan Integrasi yang lebih harmonis dalam sistem informasi (0.930), yaitu dengan cara memperbaiki sistem informasi serta aplikasi yang digunakan agar antar aplikasi dapat terintegrasi dengan baik, selain itu dapat dilakukan dengan membuat sistem informasi lebih *Ease of use* (Kemudahan penggunaan)/ mudah digunakan oleh pengguna (0.891), yaitu dengan cara mengkaji kembali dan memperbaharui sistem informasi agar aplikasi yang digunakan cukuplah satu jenis yang sudah mencakup seluruh kebutuhan pengguna, serta dengan meningkatkan *Reliability* (Keandalan) dari sistem informasi yang digunakan (0.887), yaitu dengan cara rutin melakukan *up date* sistem informasi agar terhindar dari *loading* yang lama serta menggunakan provider terpercaya agar internet/ intranet yang digunakan pun memiliki koneksi yang cepat, dan membuat sistem informasi *Adaptability* (Keadaptasian)/ bisa beradaptasi pada kebutuhan di masa yang akan datang (0.767), yaitu dengan cara selalu merancang ulang sistem informasi dengan menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan baru kedepannya maka perusahan yang membuat sistem informasi harus mampu melakukan *up date* secara berkala untuk penyesuaian kebutuhan yang terjadi agar menghasilkan sistem informasi yang berkualitas. Selain itu dapat dilakukan dengan melaksanakan Jangka waktu pemeriksaan pajak yang tepat waktu (0.891), yaitu dengan meningkatkan performa pemeriksa pajak agar pemeriksaan pajak dapat diselesaikan jauh sebelum jangka waktu berakhir, selain itu dapat dengan Mengikuti standar/ pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan perpajakan (0.872), yaitu dengan selalu melaksanakan pemeriksaan pajak berpedoman pada perundang-undangan perpajakan guna menjamin kualitas dari pemeriksaan yang sesuai peraturan, dan dengan Memperbaiki Tahapan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai prosedurnya (0.864), yaitu dengan melaksanakan seluruh proses pemeriksaan pajak didasarkan pada tahapan yang tepat dan prosedur yang sesuai denga nketentuan yang berlaku agar pemeriksaan pajak menjadi berkualitas.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Kualitas Sistem Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, dimana Sistem Informasi yang berkualitas akan menghasilkan Pemeriksaan Pajak yang berkualitas pula pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa Kemajuan sistem informasi yang telah dimanfaatkan oleh wajib pajak harus di iringi dengan penggunaan sistem informasi oleh pemeriksa, Ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010 : 260), Perkembangan komputer *hardware* dan *software* dalam sistem informasi sangat membantu pelaksanaan pemeriksaan pajak sehingga pemeriksaan dapat diselesaikan secara efisien dan efektif serta hasilnya berkualitas (John Hutagaol, 2007 : 91). Serta didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Implementasi dari

sistem informasi yang berupa teknik audit berbantu komputer berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak rutin, hal ini berarti semakin baik sistem informasi tabk akan membuat kualitas pemeriksaan pajak rutin semakin tinggi (Meli Aritonang, 2010).

Selain mendukung konsep yang telah diangkat pada kerangka pemikiran, hasil penelitian ini juga dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada kualitas pemeriksaan pajak. Dengan memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada kualitas sistem informasi, maka masalah pada kualitas pemeriksaan pajak dapat diselesaikan. Semakin berkualitas sistem informasi, maka semakin berkualitas pemeriksaan pajak. Akan tetapi masih ada faktor-faktor lain diluar kualitas sistem informasi sebesar 95% yaitu *Flexibility* (Fleksibilitas), *Functionality* (Fungsionalitas) (Santoso et al, 2007) dan *Usability* (Ketergunaan), *Availability* (Ketersediaan), *Respon time* (Lama respon) (DeLone dan Mclean, 2003).

Analisis Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilait$_{hitung}$ sebesar 6.691 lebih besar dari t$_{kritis}$ (1.96) yang menunjukkan bahwa hipotesis diterima artinya Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan. Bedasarkan fenomena yang terjadi dilapangan menunjukan bahwa Kepatuhan perpajakan masih sangat rendah (Agus Martowardojo, 2012, Yuli Kristoyo, 2013 dan Fuad Rahmany, 2014). Wajib pajak dalam menyampaikan SPT belum tepat waktu (Syafri Adnan Baharuddin, 2011 dan Agus Martowardojo, 2012). Wajib pajak dalam melakukan perhitungan jumlah pajak terutang belum benar, kepatuhan perpajakan badan usaha masih rendah (Agus Martowardojo, 2012). Kepatuhan dalam membayar pajak masih rendah (Fuad Rahmany, 2014), berdasarkan hasil pengujian penelitian ini terjadi karena kualitas pemeriksaan pajak.

Penelitian dilapangan, diperoleh dari hasil perhitungan korelasi antar variabel laten sebesar 0.369 dan nilai koefisien determinasi sebesar 13.6%, sehingga termasuk dalam kriteria rendah dengan arah positif. Arah hubungan positif antara kualitas pemeriksaan pajak dengan kepatuhan perpajakan menunjukan bahwa pemeriksaan pajak yang berkualitas akan diikuti dengan kenaikan kepatuhan perpajakan dan kontribusi kualitas pemeriksaan pajak sebesar 13.6% terhadap kepatuhan perpajakan. Sisanya sebesar 86.4% merupakan faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Besar pengaruh sebanyak 86.4% tersebut dapat dijelaskan dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan. Hasil analisis deskriptif membuktikan bahwa kepatuhan perpajakan mempunyai skor tanggapan responden sebesar 61.89% dan termasuk kategori kurang baik yang artinya kepatuhan perpajakan wajib pajak cukup baik. Artinya dengan kondisi kualitas pemeriksaan pajak tidak lebih baik dari kepatuhan perpajakan maka logis untuk mempengaruhi sedikit pada variabel kepatuhan perpajakan.

Selain dari analisis deskriptif di atas, kontribusi 13.6% tersebut dapat dilihat dari nilai standar deviasi (variasi data). Standar deviasi kualitas pemeriksaan pajak sebesar 0.042 dan standar deviasi kepatuhan perpajakan sebesar 0.068. niali standar deviasi variabel kualitas pemeriksaan pajak lebih kecil dari standar deviasi kepatuhan perpajakan, artinya kualitas pemeriksaan pajak memiliki variasi data lebih sedikit (bagus) daripada kepatuhan perpajakan yang memiliki variasi data lebih banyak (kurang bagus). Hal ini menunjukan bahwa dilihat dari nilai variasi data masing-masing variabel, kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan yaitu sebesar 13.6% (nilai koefisien determinasi).

Sehingga untuk memperbaiki masalah pada Kepatuhan Perpajakan dapat dilakukan dengan meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Pajak, selain itu dapat dilakukan dengan Wajib pajak Melakukan perhitungan dengan benar (0.893), yaitu dengan cara Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung khususnya atau Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya untuk memberikan pendidikan dan pelatihan pada wajib pajak guna memperbaiki cara wajib pajak menghitung pajak terutangnya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan, selanjutnya dengan cara wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas (0.881), yaitu dengan melakukan sosialisasi atau pelatihan pada wajib pajak dalam melakukan pengisian SPT, sehingga dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam pengisian, selain itu dapat dilakukan dengan melakukan pembayaran tepat waktu (0.783), yaitu dengan cara meningkatkan sanksi jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran pajak, agar wajib pajak yang selalu terlambat dalam

membayar pajak menjadi lebih tepat waktu, dan Wajib pajak menyampaikan SPT sebelum batas waktu berakhir (0.747), yaitu dengan cara memberikan sanksi yang lebih memberatkan lagi, agar wajib pajak yang selalu terlambat dalam menyampaikan SPT merasa diberatkan sehingga pada akhirnya dalam menyampaikan SPT menjadi tepat waktu dan kepatuhan perpajakanpun meningkat.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan, dimana Pemeriksaan Pajak yang berkualitas akan meningkatkan Kepatuhan Perpajakan pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa Pemeriksaan pajak merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh direktorat jenderal pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan dan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan (Nur Hidayat, 2013 : 324), Pemeriksaan pajak menggunakan sistem informasi dapat memberikan *deterrent effect* dan sekaligus mempengaruhi peningkatkan kepatuhan perpajakan (John Hutagaol, 2007 : 91). Serta didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyatakan Bahwa kebijakan pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan serta untuk meningkatkan tingkat kepatuhan (Deddy Arief Setiawan, 2012).

Selain mendukung konsep yang telah diangkat pada kerangka pemikiran, hasil penelitian ini juga dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada kepatuhan perpajakan. Dengan memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada kualitas pemeriksaan pajak, maka masalah pada kepatuhan perpajakan dapat diselesaikan. Semakin berkualitas pemeriksaan pajak, maka semakin baik kepatuhan perpajakan. Akan tetapi masih ada faktor-faktor lain diluar kepatuhan perpajakan sebesar 86.4% yaitu Pendaftaran wajib pajak, Penyampaian dan Penghargaan terhadap independensi akuntan publik konsultan pajak, dan Jumlah tunggakkan pajak (Widi Widodo, dkk, 2010: 254).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil fenomena, kerangka pemikiran, oprasionalisasi variabel dan hasil penelitian mengenai Pengaruh Kualitas Sistem Informasi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Implikasinya terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

Kualitas Sistem Informasi memberikan pengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak. Kualitas Pemeriksaan Pajak yang rendah terjadi karena Sistem Informasi yang digunakan belum berkualitas, yang ditandai dengan :

a) Sistem informasi yang digunakan masih sering mengalami *loading* yang lama dan memiliki koneksi internet yang lambat.
b) Sistem informasi belum mampu menyesuaikan dengan kebutuhan yang terjadi di masa mendatang karena belum *up to date*.
c) Sistem informasi belum terintegrasi secara harmonis karena dalam menginput data belum bisa maksimal dikarenakan terlalu banyaknya aplikasi.
d) Sistem informasi sudah mudah digunakan namun banyaknya aplikasi membuat pengguna sedikit kewalahan.

Kualitas Pemeriksaan Pajak memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan. Kepatuhan Perpajakan yang rendah terjadi karena pelaksanaan Pemeriksaan Pajak yang belum berkualitas,yang ditandai dengan :

a) Pemeriksaan pajak pernah mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya namun tetap tetap waktu
b) Wajib pajak kurang memperhatikan peraturan perundang-undangan perpajakan yang sudah di tetapkan mengenai pemeriksaan pajak
c) Wajib pajak belum paham mengenai tata cara pemeriksaan pajak

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Kualitas Sistem Informasi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Implikasinya terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

Saran Operasional

1. Untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak maka sistem informasi yang digunakan harus dikembangkan agar menjadi lebih berkualitas. Karena sistem informasi yang digunakan sifatnya terpusat langsung dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak maka perbaikan harus dilakukan di kantor pusat DJP. Sumber Daya Manusia yang membuat Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak haruslah SDM yang mengerti situasi dan kondisi dilapangan dimana sistem informasi tersebut dipakai. Sistem informasi tersebut dipakai oleh Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia khususnya Madya Bandung dalam penelitian ini harus disesuaikan dengan kebutuhan *user* atau pengguna dilapangan. Jadi SDM yang membuat sistem informasi harus mengerti kebutuhan *user* dilapangan dan menghasilkan sistem informasi yang dapat menunjung seluruh pekerjaan pegawai serta meningkatkan performa dari sistem informasi itu sendiri dimulai dari tidak sering mengalami *loading*, memiliki koneksi internet atau intranet yang cepat, lebih mudah lagi digunakan, terintegrasi lebih harmonis antar aplikasi, dan selalu *up to date*.

2. Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan maka pemeriksaan pajak yang dilakukan harus diperbaiki agar menjadi lebih berkualitas. Perbaikan pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan memperhatikan ke efektifan jangka waktu dalam melakukan pemeriksaan dimulai dari pengajuan restitusi oleh wajib pajak, penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan, pengumpulan dokumen, dan proses pemeriksaan itu sendiri agar tidak memakan waktu yang terlalu lama. Tidak lupa pemilihan pegawai fungsional pemeriksa pajak yang lebih berkompeten dalam pemeriksaan bisa dilakukan dengan seleksi yang ketat agar menunjang proses pemeriksaan serta penyesuaian beban kerja bagi pemeriksa dimana jika wajib pajak yang harus diperiksa banyak maka kelompok fungsional pemeriksa pajakpun harus memiliki jumlah yang lebih banyak lagi agar pemeriksa pajak menjadi berkualitas dan menghasilkan pemeriksaan pajak yang berkualitas pula, dan pemberian sanksi yang cukup berat kepada pemeriksa pajak yang gagal atau mengalami keterlambatan (penyelesaian pemeriksaan melebihi jangka waktu) dalam melakukan pemeriksaan. Perbaikan pemeriksaan pajak juga dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap pemeriksa pajak guna meningkatkan kemampuan pemeriksa itu sendiri, Serta memberikan pendidikan kepada wajib pajak lewat seminar atau pendidikan dan pelatihan serupa dengan pemeriksa pajak agar wajib pajak paham mengenai pemeriksaan pajak sehingga saat dilakukan pemeriksaan pajak tidak ada kesalah pahaman yang terjadi antara pemeriksa pajak dan wajib pajak yang diperiksa karena ketidak pahaman wajib pajak tersebut mengenai pemeriksaan pajak. Pendidikan dan pelatihanpun dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang tata cara menghitung pajak yang benar, serta tata cara mengisi SPT yang benar, lengkap dan jelas. Guna meningkatkan kepatuhanpun Direktorat Jenderal Pajak haruslah membuat peraturan baru mengenai kenaikan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang membayar pajak tidak tepat waktu, dan melaporkan SPT tidak tepat waktu, agar timbul efek jera. Serta kenaikan sanksi untuk wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak dan ternyata terbukti melakukan kesalahan dengan sengaja, agar timbul efek jera sehingga tidak akan melakukan kesalahan yang sama dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Saran Pengembangan Ilmu

Disarankan pada peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, menggunakan metode yang sama namun dengan unit analisis, populasi, dan sampel yang berbeda guna diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori serta konsep yang telah dibangun sebelumnya baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Azhar Susanto. 2007. *Sistem Informasi Manajemen Konsep Dan Pengembangannya.* Bandung : Lingga Jaya.

Deddy Arief Setiawan. 2012. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Pemeriksaan Pajak Oleh Direktorat Jenderal Pajak.*

DeLone, William H. & McLean, Ephraim R., 2003, *The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update, Journal of Management Information Systems / Spring 2003*, Vol. 19, No. 4, pp. 9–30.

Dewi Rachmat Kusuma 2014. *Fuad Minta Capres Dan Caleg Jadi Contoh Taat Bayar Pajak.* Melalui <http://finance.detik.com /read/2014/03/24/161546 /2534963 /4/fuad-minta-capres-dan-caleg-jadi-contoh-taat-bayar-pajak>.

Dewi Rachmat Kusuma. 2013. *Makin Banyak Perusahaan Dan Orang Yang Tidak Taat Bayar Pajak.* Melalui <http://finance.detik.com/read /2013/06/ 21/133941/2280154/4/makin-banyak-perusahaan-dan-orang-yang-tidak-taat-bayar -pajak>.

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta : Graha Ilmu.

Meli Aritonang. 2010. *Analisis Implementasi Teknik Audit Berbantu Komputerpengaruhnya Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak Rutin Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang*. Universitas Komputer Indonesia.

Mirna Indriani Dan Reza Adryan. 2009. *Kualitas Sistem Informasi Dan Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Perguruan Tinggi Universitas Kuala*. Kuala : Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.

Nur Hidayat. 2013. *Pemeriksaan Pajak Menghindari Dan Menghadapi*. Jakarta : Pt Elex Media Komputindo.

Ramdhania El Hida. 2010. *Agus Marto Beberkan Kelemahan Di Ditjen Pajak.* Melalui <http://finance.detik.com/read/2010/09/22/125714/ 1445625/4/ agus-marto-beberkan-kelemahan-di-ditjen-pajak>.

Ramdhania El Hida . 2011*. Tingkatkan Pengawasan, Ditjen Pajak Dan Bea Cukai Barter Data.* Melalui <http://finance.detik.com/read/2011/01/02/ 141032/ 1537569/4/tingkatkan-pengawasan-ditjen-pajak--dan-bea-cukai-barter-data>*.*

Ramdhania El Hida . 2012*. Kejar Setoran Rp 1.178 Triliun, Agus Marto Seret Wajib Pajak 'Bandel'.* Melalui <http://finance.detik.com/read/2012 /08/17/102342/1993894/4/kejar-setoran-rp-1178-triliun-agus-marto-seret -wajib-pajak-bandel>*.*

Ramdhania El Hida. 2010. *Wajib Pajak Masih Kecewa Dengan Pelayanan Kantor Pajak*. Melalui <http://finance.detik.com/read/2010 /10/05/141529 /1456035/4/wajib-pajak-masih-kecewa-dengan-pelayanan-kantor-pajak>.

Ramdhania El Hida. 2010. *Dirjen Pajak 'Paksa' Aparat Pajak Tingkatkan Kualitas*. Melalui <http://finance.detik.com/read/2012/05/12 /130923/ 1915588/4/dirjen-pajak-paksa-aparat-pajak-tingkatkan-kualitas>.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal.* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Soemarso, S.R. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta : Salemba Empat.

Widi Widodo, Dkk. 2010. *Moralitas, Budaya Dan Kepatuhan Pajak.* Bandung : Alfabeta.

Witarto. 2004. *Memahami Sistem Informasi Penedekatan Praktis Rekayasa Sistem Informasi Melalui Kasus-Kasus SI Disekitarnya.* Bandung : Informatika.

Yang, Kaifeng & Miller, Gerald J. 2008. *Handbook of Research Methods in Public Administration.* Taylor & Francis Group : CRC Press U.S.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1
Desain Penelitian

Tujuan Penelitian	Desain Penelitian			
	Metode Penelitian	**Metode Pengumpulan Data**	**Unit Analisis**	***Time Horizon***
T-1	Deskriptif & Verifikatif	*Survey*	*Account Representative* dan Pemeriksa Pajak	*Cross Sectional*
T-2	Deskriptif & Verifikatif	*Survey*	*Account Representative* dan Pemeriksa Pajak	*Cross Sectional*

Keterangan :
T-1 : Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Sistem Informasi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
T-2 : Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	No Kuesioner	Skala
Kualitas sistem informasi (X) DeLone dan Mc Lean (2003) Shannon dan Weaver (2003) Witarto (2004 : 19)	Kualitas sistem informasi adalah performa yang diukur dari berkualitas atau tidaknya serta sudah *up to date*nya suatu sistem informasi yang menghasilkan sebuah informasi sebagai bahan pengambilan keputusan.	1. *Reliability* (Keandalan) (Basuki dan Abdurrachman, 2001)	1 - 2	Ordinal
		2. *Adaptability* (Keadaptasian) (DeLone dan Mclean, 2003)	3 – 4	
		3. Integrasi yang harmonis (Azhar Susanto, 2007 : 106)	5	
		4. *Ease of Use* (Kemudahan Penggunaan (Davis FD, 1989)	6	
Kualitas pemeriksaan pajak (Y) John Hutagaol (2007 : 91) Siti Kurnia Rahayu (2010 : 264)	Kualitas Pemeriksaan Pajak adalah tingkat baik atau buruknya hasil dari kegiatan pemeriksaan dalam menguji kepatuhan di dasarkan kepada prosedur pemeriksaan yang dilakukan benar, jangka waktu dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai, serta berpedoman pada perundang-undangan perpajakan.	1. Tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya. (Siti Kurnia Rahayu, 2010 : 264)	7	Ordinal
		2. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu. (Siti Kurnia Rahayu, 2010 : 264)	8 - 9	
		3. Mengikuti standar/ pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan perpajakan. (Siti Kurnia Rahayu, 2010 : 264)	10 - 11	
Kepatuhan	Kepatuhan perpajakan	1. Wajib Pajak mengisi formulir	12	Ordinal

perpajakan (Z) Safri Nurmantu dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) James dikutip oleh Gunadi (2005 : 5) KMK No. 544/ KMK.04/ 2000 Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010 : 139)	adalah suatu kondisi dimana wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik serta sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti mengisi formulir SPT dengan lengkap, benar dan jelas, menghitung pajak dengan benar, membayar pajak tepat waktu, dan menyampaikan SPT tepat waktu.	SPT dengan benar, lengkap dan jelas. Norman D. Nowak (Moh. Zain : 2004)		
		2. Melakukan perhitungan dengan benar. Norman D. Nowak (Moh. Zain : 2004)	13	
		3. Melakukan pembayaran tepat waktu. Norman D. Nowak (Moh. Zain : 2004)	14	
		4. Wajib Pajak menyampaikan SPT sebelum batas waktu berakhir. (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 139)	15	

Tabel 4.1
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Sistem Informasi

Butir Pertanyaan	R	r_{kritis}	Keterangan
Item 1	0.806	0.3	Valid
Item 2	0.670	0.3	Valid
Item 3	0.737	0.3	Valid
Item 4	0.791	0.3	Valid
Item 5	0.794	0.3	Valid
Item 6	0.711	0.3	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan *SPSS 20.0*

Tabel 4.2
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak

Butir Pertanyaan	R	r_{kritis}	Keterangan
Item 1	0.725	0.3	Valid
Item 2	0.730	0.3	Valid
Item 3	0.582	0.3	Valid
Item 4	0.725	0.3	Valid
Item 5	0.694	0.3	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan *SPSS 20.0*

Tabel 4.3
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Perpajakan

Butir Pertanyaan	R	r_{kritis}	Keterangan
Item 1	0.602	0.3	Valid
Item 2	0.781	0.3	Valid
Item 3	0.751	0.3	Valid
Item 4	0.702	0.3	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan *SPSS 20.0*

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Koefisien Reliabilitas

No	Variabel	Koefisien Reliabilitas	r_{kritis}	Keterangan
1	Kualitas Sistem Informasi (X)	0.907	0.7	Reliabel
2	Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y)	0.821	0.7	Reliabel
3	Kepatuhan Perpajakan (Z)	0.754	0.7	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan *SPSS 20.0*

Tabel 4.5
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Kualitas Sistem Informasi

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%
1	*Reliability* (Keandalan)	443	660	67.12
2	*Adaptability* (Keadaptasian)	448	660	67.88
3	Integrasi yang harmonis	243	330	73.64
4	*Ease of use* (Kemudahan penggunaan)	252	330	76.36
Total		**1386**	**1980**	**71.25%**

Sumber : Data Hasil Penelitian

Tabel 4.6
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Kualitas Pemeriksaan Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%
1	Tahapan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai prosedurnya	287	330	86.97
2	Jangka waktu pemeriksaan pajak yang tepat waktu	542	660	82.12
3	Mengikuti standar/ pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan perpajakan	546	660	82.73
Total		**1375**	**1650**	**83.94%**

Sumber : Data Hasil Penelitian

Tabel 4.7
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Kepatuhan Perpajakan

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%
1	Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas	218	330	66.06
2	Melakukan perhitungan dengan benar	210	330	63.64
3	Malakukan pembayaran tepat waktu	199	330	60.30
4	Wajib pajak menyampaikan SPT sebelubatas waktu berakhir	190	330	57.58
Total		**817**	**1320**	**61.89%**

Sumber : Data Hasil Penelitian

Tabel 4.8
Bobot Faktor Variabel Kualitas Sistem Informasi

Variabel Manifest	Loading Factor	Measurement model	R^2	t_{hitung}
Reliability (Keandalan)	0.887	KSI = $0.887X_1$ + 0.213	0.787	3.104
Adaptability (Keadaptasian)	0.767	KSI = 0.767 X_2 + 0.411	0.589	2.127
Integrasi Yang Harmonis	0.930	KSI = 0.930 X_3 + 0.135	0.865	4.009
Ease Of Use (Kemudahan Penggunaan)	0.891	KSI = 0.891 X_4 + 0.206	0.794	2.674
***Composite reliability*(CR) = 0.927**				
***Average Variance Extracted*(AVE) = 0.759**				

Sumber : Lampiran Output *SmartPLS*

Tabel 4.9
Bobot Faktor Variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak

Variabel Manifest	Loading Factor	Measurement model	R^2	t_{hitung}
Tahap pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya	0.864	KPP = 0.864 Y_1 + 0.253	0.747	8.556
Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu	0.891	KPP = 0.891 Y_2 + 0.206	0.794	10.891
Mengikuti standar/ pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan perpajakan	0.872	KPP = 0.872 Y_3 + 0.239	0.761	8.508
***Composite reliability*(CR) = 0.909**				
***Average Variance Extracted*(AVE) = 0.768**				

Sumber : Lampiran Output *SmartPLS*

Tabel 4.10
Bobot Faktor Variabel Kepatuhan Perpajakan

Variabel Manifest	Loading Factor	Measurement model	R^2	t_{hitung}
Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas	0.881	KP= 0.881 Z_1 + 0.223	0.777	5.034
Melakukan perhitungan dengan benar	0.893	KP = 0.893 Z_2 + 0.202	0.798	4.333
Melakukan pembayaran tepat waktu	0.783	KP = 0.783 Z_3 + 0.386	0.614	3.789
Wajib pajak menyampaikan SPT sebelum batas waktu berakhir	0.747	KP = 0.747 Z_4 + 0.441	0.559	3.879
***Composite reliability*(CR) = 0.897**				
***Average Variance Extracted*(AVE) = 0.687**				

Sumber : Lampiran Output *SmartPLS*

Tabel 4.11
Nilai *Convergent Validity*

Variabel *Manifest* (Indikator)	Variabel Laten		
	Kualitas Sistem Informasi	Kualitas Pemeriksaan Pajak	Kepatuhan Perpajakan
X1	0.888	0.192	0.390
X2	0.768	0.135	0.189

X3	0.931	0.209	0.302
X4	0.892	0.222	0.360
Y1	0.221	0.864	0.257
Y2	0.200	0.892	0.338
Y3	0.168	0.873	0.364
Z1	0.428	0.446	0.882
Z2	0.256	0.267	0.893
Z3	0.120	0.184	0.784
Z4	0.287	0.174	0.748

Sumber : Lampiran Output *SmartPLS*

Tabel 4.12
Perbandingan Nilai AVE dengan Korelasi antar Variabel Laten

	Discriminant Validity		**Nilai Korelasi**		
	AVE	**Akar Kuadrat AVE**	**Kualitas Sistem Informasi (X)**	**Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y)**	**Kepatuhan Perpajakan (Z)**
Kualitas Sistem Informasi (X)	0.759	0.872	1,000	0.221	0.365
Kualitas Sistem Informasi (X)	0.768	0.877	0.221	1,000	0.369
Kepatuhan Perpajakan (Z)	0.687	0.829	0.365	0.369	1,000

Sumber : Lampiran Output *SmartPLS*

Tabel 4.13
Hasil Uji Kecocokan Model Struktural

Variabel Laten	**Koefisien Korelasi**	**t_{hitung}**	**R^2**
Kualitas Sistem Informasi → Kualitas Pemeriksaan Pajak	0.221	2.831	0.050
Kualitas Pemeriksaan Pajak → Kepatuhan Perpajakan	0.369	6.691	0.136

Sumber : Lampiran Output *SmartPLS*

Tabel 4.14
Nilai *Goodness of Fit*

Nilai	**Variabel Laten**			**Nilai Rata-rata**	**Akar Nilai rata-rata**
	Kualitas SIstem Informasi	**Kualitas Pemeriksaan Pajak**	**Kepatuhan Perpajakan**		
Communality	0.759	0.768	0.687	0.738	0.860
R^2		0.050	0.136	0.093	0.305
***Goodness of Fit* (GoF) =0.870 x 0.304 = 0.263**					

Sumber : Lampiran Output *SmartPLS*

Tabel 4.15
Persamaan Struktural Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Endogenous Construct	=	*Exogenous Construct*	+	*Error Variance*
Kualitas Sistem Informasi		Kualitas Pemeriksaan Pajak		
η_1	=	0.221 (2.831)	+	0.950

Keterangan: Angka dalam kurung adalah nilai statistik uji-t.
Sumber : Lampiran Output *SmartPLS*

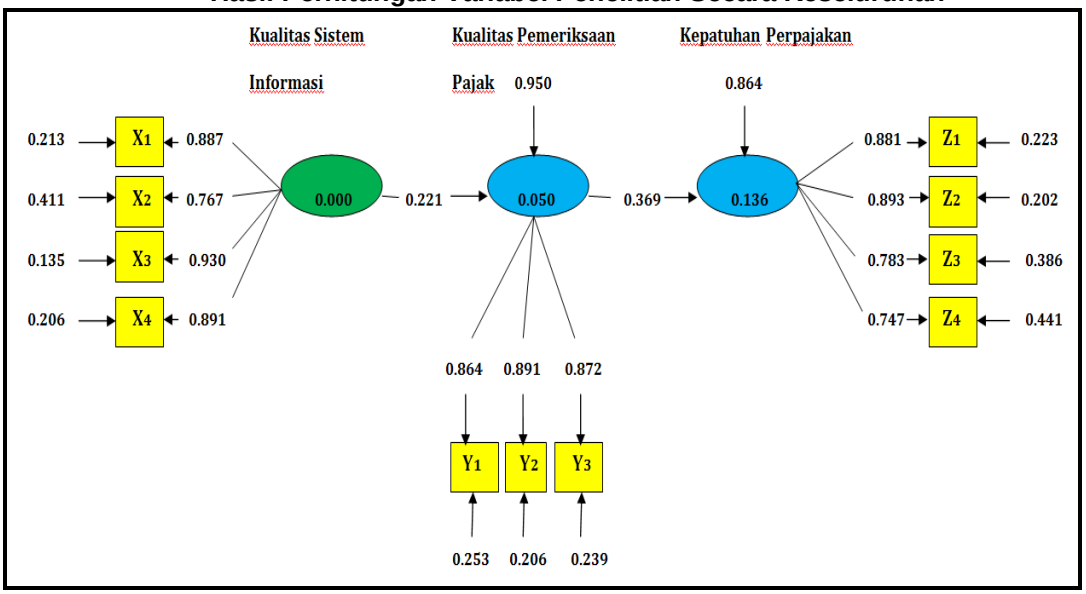
Tabel 4.16
Persamaan Struktural Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Endogenous Construct	=	*Exogenous Construct*	+	*Error Variance*
Kualitas Pemeriksaan Pajak		Kepatuhan Perpajakan		
η_1	=	0.369 (6.691)	+	0.864

Keterangan: Angka dalam kurung adalah nilai statistik uji-t.
Sumber : Lampiran Output *SmartPLS*

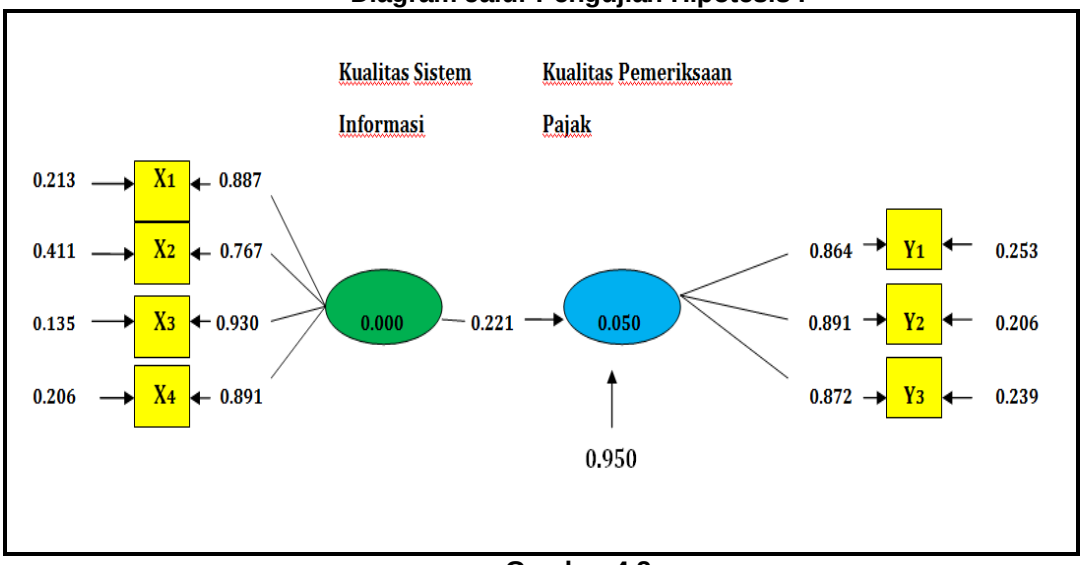
DAFTAR GAMBAR

Hasil Perhitungan Variabel Penelitian Secara Keseluruhan



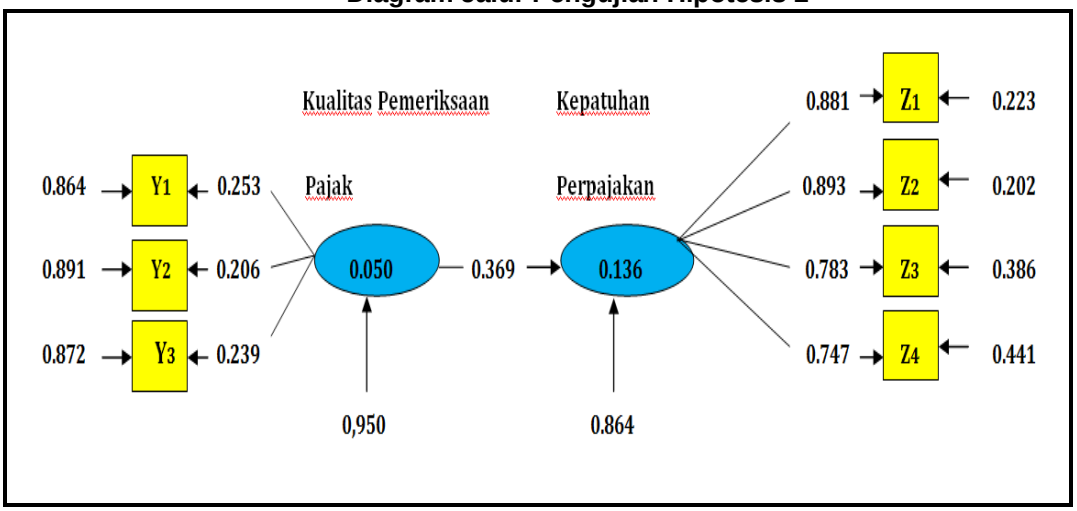
Gambar 4.1
Hasil Perhitungan Variabel Penelitian Secara Keseluruhan

Diagram Jalur Pengujian Hipotesis I



Gambar 4.2
Diagram Jalur Pengujian Hipotesis I

Diagram Jalur Pengujian Hipotesis 2



Gambar 4.3
Diagram Jalur Pengujian Hipotesis 2